



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2015/PA.Nnk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SD, tempat kediaman di **Pemohon I** Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di **Pemohon II** Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 78/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 Februari 2009 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aring yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Mansur, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Hamka dan Syahril, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM 150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405081002820002 tanggal 15 Maret 2013 atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405084709890002 tanggal 15 Maret 2013 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082008100001 tanggal 9 Januari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1, umur 30 tahun dan saksi 2, umur 20 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 Februari 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aring yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Mansur, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Hamka dan Syahril, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM 150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 27 Februari 2009, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aring yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Mansur, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Hamka dan Syahril, dan mahar uang sebesar RM 150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



نحوولي من وشروطه صحته ذكر اة امر علي بنكاح ي عو الد وفي  
عدول هدين وشا

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2009, di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrh** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.



Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

**Perincian Biaya Perkara :**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00  |
| 3. Pengumuman   | Rp 75.000,00  |
| 4. Panggilan    | Rp 325.000,00 |

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 5. Redaksi    | Rp 5.000,00          |
| 6. Meterai    | Rp 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 491.000,00</b> |

Nunukan, 01 Juli 2015

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)